

LABOUR FORCE COLLECTIVITY IN AGRICULTURE
(A Study on the Implication of Labour Force on Farmers' Income
in Sumedang Residence, West Java)

Abstract

By:
Opan S. Suwartapradja

The aim of the study were to explore and comprehend the local potential related with labourforce in farming community in cost reducing in one side and income generating alternative in other side. The study had been conducted by using qualitative approach which descriptive analysis. The resultsof the study indicated that lack of morker in higher class farmers had been replaceable by using tractor, while in middle and low class farmers who once used their children by now replaced by friends based on close rice filed blocks. This kind of cooperation could keep their relationship solidarity, reduce production cost and in turn increased their income.

Keywords: The prevailing system, farmers' income.

KOLEKTIFITAS TENAGA KERJA DALAM PERTANIAN
(Studi Tentang Implikasi Curahan Tenaga Kerja Terhadap Pendapatan Petani
di Kabupaten Sumedang, Jawa Barat)

Abstrak

Oleh :
Opan S.Suwartapradja

Tujuan penelitian adalah untuk menggali dan memahami potensi lokal yang terkait dengan ketenagakejaan yang tumbuh dalam kehidupan masyarakat petani sebagai suatu alternatif di dalam mengurangi biaya produksi dan atau meningkatkan pendapatan petani. Metode yang dipergunakan deskriptif analisis dengan pendekatan kualitatif. Kesulitan tenaga kerja disektor pertanian ini bagi golongan atas tergantikan oleh traktor. Sedangkan bagi petani golongan menengah ke bawah yang semula menggunakan tenaga kerja anak-anaknya tergantikan dengan cara pertemanan baik berdasarkan domisili maupun berdasarkan hamparan. Bentuk kerjasama ini tidak hanya menjaga hubungan dan meningkatkan solidaritas akan tetapi juga dapat mengurangi biaya produksi yang pada gilirannya meningkatkan pendapatan petani.

Kata Kunci : Sistem pertemanan, pendapatan petani.

KOLEKTIFITAS TENAGA KERJA DALAM PERTANIAN
(Studi Tentang Implikasi Curahan Tenaga Kerja Terhadap Pendapatan Petani
di Kabupaten Sumedang, Jawa Barat)

Oleh :
Opan S. Suwartapradja *)

I. PENDAHULUAN

Pembangunan pedesaan identik dengan pembangunan pertanian, seperti telah diungkapkan oleh Geertz (1976), Penny (1982) Collier (1977), Hayami-Kikuchi (1981) dan Marzali (2003). Perhatian terhadap masalah ini oleh Mubiyarto (1985:2-3), dan Geertz (1976) diungkapkan bahwa petani Indonesia khususnya Jawa bersifat statis karena berada dalam kemiskinan sebagai akibat dari penjajahan Belanda. Penny (1982) menyatakan bahwa petani Indonesia yang merdeka tetap belum mampu keluar dari belenggu sistem ekonomi pasar yang merasuk ke pedesaan. Komersialisasi (pazarisasi) pertanian memiskinkan petani gurem. Collier (1977) menyatakan bahwa petani tidak berinovasi tetapi berevolusi, berubah atau maju tetapi lambat sekali.

Kelembagaan di Jawa seperti diungkapkan Hayami – Kikuchi (1981) mampu menghambat terjadinya proses polarisasi dan yang lebih banyak terjadi adalah stratifikasi sosial, yaitu pembedaan masyarakat pedesaan dengan tetap adanya hubungan bapak anak buah (*patron-client relationship*). Seperti halnya pemerhati pedesaan di atas, Marzali (2003: 3) menyatakan bahwa gejala kemiskinan di pedesaan bermula dari tekanan penduduk yang tidak terimbangi oleh perkembangan teknologi pertanian dan kemajuan institusi ekonomi pedesaan. Soemarwo (1983) mengungkapkan bahwa kemiskinan pedesaan selain karena tekanan penduduk juga karena tidak seimbang arus informasi antara desa dan kota.

*) . Staf Pengajar Jurusan Antropologi FISIP-UNPAD dan Peneliti di PPK & SDM dan PPSDAL-LPPM-UNPAD.

Mencermati pendapat para pakar tersebut diatas, kemudian pemerintah menggiatkan pembangunan disektor pertanian. Upaya-upaya yang dilakukan selama ini lebih kepada peningkatan produksi. Keberhasilan program panca usaha tani, telah meningkatkan produksi dan tercapainya swasembada beras pada tahun 1984. Secara konseptual tercapainya swasembada beras sekaligus meningkatkan pendapatan petani. Pada kenyataannya tidak demikian, karena produk petani ini tergantung kepada biaya produksi dan harga jual, sehingga pendapatan petani masih termajinalkan.

Tulisan ini mengetengahkan potensi lokal dalam upaya mengurangi biaya produksi, khususnya dalam penggunaan tenaga kerja yang keberadaannya semakin tersisihkan. Asumsi yang dibangun dalam tulisan ini adalah bahwa pengetahuan dan pranata-pranata lokal kurang mendapat apresiasi, sehingga pendapatan petani tidak meningkat atau tetap rendah.

II. TINJAUAN PUSTAKA

1. Angkatan Kerja

Tenaga kerja atau *manpower* adalah penduduk usia kerja, yaitu besarnya bagian dari penduduk yang dapat diikutsertakan dalam proses ekonomi (Tan Goan Tiang, 1965 : 71 dalam Mantra 1985:187). Di Indonesia yang dimaksud dengan angkatan kerja adalah penduduk yang berusia 10 tahun ke atas yang secara aktif melakukan kegiatan ekonomi (Biro Pusat Statistik, 1983 :1 dalam Mantra, 1985:187). Angkatan kerja menurut BPS (1983) terdiri dari penduduk yang bekerja, mempunyai pekerjaan tetapi sementara tidak bekerja dan tidak mempunyai pekerjaan sama sekali tetapi mencari pekerjaan secara aktif. Bagi mereka yang berusia 10 tahun atau lebih tidak bekerja atau mencari pekerjaan karena sekolah, mengurus rumah tangga, pensiun atau secara fisik dan mental tidak memungkinkan untuk bekerja tidak dimasukan ke dalam angkatan kerja (Mantra, 1985:187-188).

2. Tenaga Kerja dalam Pertanian

Tenaga kerja dalam pertanian bisa dilakukan secara individual ataupun secara kolektif, akan tetapi pada umumnya dilakukan secara individual. Secara kolektif dalam bentuk kerjasama dengan cara bergiliran. Cooley dalam Soekanto (1982 : 67) mengemukakan bahwa kerjasama timbul apabila orang menyadari mempunyai kepentingan-kepentingan yang sama; kesadaran akan adanya kepentingan-kepentingan yang sama dan adanya organisasi merupakan bentuk kerja sama yang berguna. Kerjasama merupakan suatu usaha bersama antara orang perorangan atau kelompok manusia untuk mencapai satu atau beberapa tujuan bersama. Bentuk dan pola-pola kerjasama secara universal dapat dijumpai pada kelompok manusia.

Kerjasama atau juga dikenal dengan istilah gotong royong, merupakan suatu bentuk kegiatan yang tumbuh dan berkembang dalam masyarakat agraris. Pada masyarakat desa, gotong royong merupakan suatu sistem pengerahan tenaga kerja dalam suatu pekerjaan tertentu untuk kepentingan bersama, seperti, memperbaiki saluran air dan atau membangun jalan desa. Munculnya gotong royong terkait dengan zaman kerajaan-kerajaan kuno, yang pada waktu itu rakyat di desa dikerahkan untuk bekerja tanpa bayaran dalam proyek-proyek pembangunan bagi raja, bagi agama atau bagi kerajaan. Pada zaman penjajahan kerja bakti itu untuk mengerahkan tenaga kerja bagi proyek-proyek pemerintah kolonial, sedangkan pada era kemerdekaan digunakan secara luas dalam pembangunan (Koentjaraningrat, 1977b:63).

Sistem gotong royong sebagai suatu sistem pengerahan tenaga kerja amat cocok dan fleksibel pada masyarakat petani di pedesaan, terutama sebelum masuknya sistem uang pada masyarakat petani pedesaan (Koentjaraningrat, 1977b : 60). Gotong royong dan tolong menolong dalam konsep yang dikemukakan Koentjaraningrat terkait dengan aktivitas pertanian mempunyai pengertian yang sama. Sebetulnya tidak demikian. Marzali membedakan gotong royong dengan tolong menolong, yaitu gotong royong suatu bentuk kerjasama untuk menyelesaikan suatu pekerjaan untuk kepentingan bersama, tidak ada prinsip *reciprocity* dan kecurangan terjadi apabila

seseorang tidak berpartisipasi dalam pekerjaan. Dipihak lain tolong menolong, berdasarkan atas prinsip *reciprocity* dan kecurangan terjadi apabila seseorang tidak “membalas” jasa atau benda yang telah diterimanya dari pemberi Marzali (2003 : 159).

Gotong royong adalah kerjasama untuk kepentingan kolektif, sedangkan tolong menolong atau Bantu membantu suatu bentuk kerjasamanya untuk kepentingan individual. Dalam aktivitas pertanian tolong-menolong atau bantu membantu mempunyai pengertian yang sama terutama dalam kegiatan pengolahan lahan, penanaman dan penyiangan. Bantu membantu atau tolong menolong, muncul ketika suatu keluarga kekurangan tenaga kerja dalam pengolahan lahan dan kemudian meminta bantuan kepada teman/tetangga untuk mengisi kekosongan tenaga kerja tadi. Bantu membantu dalam pengolahan lahan dilakukan berdasarkan hamparan dan atau berdasarkan domisili.

III. METODE PENELITIAN

Penelitian ini mencoba menggali potensi lokal dalam penggunaan tenaga kerja disektor pertanian, seiring dengan meningkatnya biaya produksi. Metode deskriptif dengan pendekatan kualitatif dimaksudkan untuk mendeskripsikan, menggambarkan atau melukiskan suatu fenomena secara sistematis, faktual dan akurat mengenai fakta-fakta, sifat-sifat serta hubungan antar fenomena yang diselidiki (Nazir, 2003: 54), yaitu menggambarkan sistem penggunaan tenaga kerja pada masyarakat petani.

Objek yang diteliti adalah fenomena sosial dalam penggunaan tenaga kerja disektor pertanian. Informan dalam penelitian ini berdasarkan strata social yang mengacu kepada luas pemilikan lahan, yaitu petani yang bertani di lahan basah dan di lahan kering. Penelitian dilakukan dengan pertimbangan bahwa di daerah Kabupaten Sumedang dengan pertimbangan bahwa di daerah ini terdapat petani lahan basah dan petani lahan kering yang dapat menggambarkan penggunaan tenaga kerja dalam sistem pertanian di wilayah Jawa Barat.

IV. HASIL DAN PEMBAHASAN

4.1. Matapencaharian Penduduk

Seperti di daerah pedesaan lainnya, bertani merupakan sumber penghidupan utama lebih dari 50 % penduduk yang bermukim di pedesaan. Tabel 1 menunjukkan bahwa matapencaharian utama penduduk didaerah penelitian 59,4 % mengandalkan hidupnya dari sektor pertanian. Mereka terdiri dari petani pemilik tidak menggarap, petani pemilik penggarap, penggarap dan buruh tani. Matapencaharian lain yang menonjol adalah buruh dan jasa perdagangan masing-masing 8,0 % dan 32,6 %.

Penyerapan tenaga kerja pada sektor pertanian erat terkait dengan kondisi daya dukung lingkungan dan masih tingginya minat investasi pada komoditas ini. Tenaga kerja disektor ini terkait dengan strata sosial masyarakat yang bersangkutan. Petani kaya lebih banyak mempergunakan traktor dan buruh tani. Petani golongan menengah lebih banyak menggunakan tenaga kerja buruh tani dan golongan miskin atau petani gurem mempergunakan tenaga kerja keluarga dan pertemanan.

Tabel : 1. Persentase matapencapaian penduduk

No.	Jenis Pekerjaan	%
I.	Sektor Pertanian	
1.	Petani Pemilik tidak menggarap	1,4
2.	Petani Pemilik Penggarap	44,9
3.	Petani Penggarap	3,7
4.	Peternak	3,4
5.	Buruh tani	6,1
	Sub total	59,4
II.	Perdagangan & Jasa	
1.	Perdagangan *	8,0
	Sub total	8,0
2.	Jasa	
	Tukang Bangunan	15,4
	Tukang Kusen	0,7
	Tukang Jahit	0,1
	Tukang Bilik	0,1
	Jumlah	16,3
	Pegawai pemerintah/Swasta	
	PNS	3,2
	Pensiunan	1,9
	Pegawai Swasta	1,1
	Jumlah	6,2
	Wira usaha	
	Pemilik Huleur	0,2
	Jumlah	0,2
	Buruh/Jasa	
	Buruh Huleur	0,5
	Buruh Serabutan	3,5
	Sopir	2,1
	Kernet	0,7
	Ojeg	2,3
	Bengkel	0,4
	Ustadz	0,3
	Penebang kayu	0,1
	Jumlah	9,9
	Sub Total	32,6
	Total	100

Sumber : Suwartapradja, 2007

4.1. Tenaga Kerja Non-Kolektif

1. Tenaga Kerja Buruh Tani dan Mekanisasi Pertanian

Tenaga kerja disektor pertanian terdiri dari buruh tani yang berasal dari daerah setempat dan dari luar daerah. Buruh tani dari daerah setempat terdapat buruh tani yang berlangganan atau pekerja *matuh* pada satu majikan (*ngadunungan*) yang disebut *bujang (client)* dan buruh tani yang tidak berlangganan yang mempunyai lebih dari satu majikan. Buruh tani setempat ini, baik laki-laki maupun perempuan berjumlah sekitar 6,1 % dari total buruh tani yang dibutuhkan. Jumlah buruh tani tersebut dapat dikatakan relatif sedikit, karena pada saat pengolahan lahan yang serentak diperlukan tenaga kerja yang tidak sedikit, sehingga masih kekurangan tenaga kerja.

Buruh tani yang berasal dari luar daerah, seperti dari daerah Majalengka, baik laki-laki maupun perempuan berjumlah sekitar 70 % dari kebutuhan buruh tani di daerah setempat. Dari jumlah tersebut terdapat sekitar 10 % menetap menjadi penduduk setempat dan sisanya yaitu sekitar 60 % bermukim untuk sementara atau sirkulasi selama kegiatan berlangsung. Buruh tani yang berasal dari luar daerah tersebut terdapat buruh tani yang berlangganan dan buruh tani yang tidak berlangganan. Buruh tani yang berlangganan merupakan pilihan majikan mempunyai etos kerja yang baik dan beberapa diantaranya menetap atas permintaan majikan. Buruh tani tersebut kemudian dibuatkan rumah (*ditetepkeun*) dimaksudkan untuk memudahkan dalam pemenuhan tenaga kerja.

Munculnya mekanisasi pertanian atau tenaga kerja traktor nampaknya tidak terantisipasi oleh van der Kroef (dalam Mubyarto, 1985) yang hanya menekankan kepada anggota keluarga. van der Kroef juga tidak mengantisipasi kesulitan tenaga kerja di sektor pertanian, yaitu adanya perubahan paradigma pada masyarakat petani. Petani yang semula mengorientasikan anaknya ke sektor pertanian pada saat sekarang berubah ke sektor non-pertanian. Anak-anak mereka sebagai penerus menggantikan orang tuanya disektor pertanian bekerja disektor non-pertanian baik di sektor formal maupun non-formal. Anak-anak diharapkan dapat bekerja di sektor formal agar

memperoleh penghasilan tetap yang dapat menjamin ekonomi rumah tangganya. Orang tua kemudian tidak lagi mengandalkan pewarisan lahan bagi anak-anaknya, akan tetapi memberikan bekal pendidikan dengan harapan ekonominya lebih baik daripadanya. Perubahan paradigma orang tua demi masa depan anak-anaknya itu berimplikasi terhadap sektor pertanian yaitu tidak hanya berkurangnya generasi penerus (*Lost Generation*), akan tetapi juga berkurangnya tenaga kerja dan berkurangnya pemeliharaan ternak.

Lebih lanjut, meningkatnya mobilitas sirkuler desa-kota yang bekerja disektor informal berdampak terhadap ikatan sosial, yaitu semakin longgarnya ikatan diantara mereka baik dengan kerabat maupun dengan teman tetangga yang telah terjalin selama hidupnya. Dorongan mobilitas yang lebih mempertimbangkan aspek ekonomi (Mantra, 1985) karena adanya nilai kefaedahan daerah yang berbeda dan semakin sempitnya lapangan pekerjaan karena desakan teknologi modern Mekanisasi pertanian seperti traktor sebagai pengganti dalam pengolahan lahan berdampak terhadap semua lapisan masyarakat baik yang terkena pembangunan maupun yang tidak terkena pembangunan. Bagi mereka yang terkena pembangunan yang mengharuskannya untuk pindah, seperti pembangunan perumahan, industri, kesehatan dan pembangunan bendungan telah menimbulkan pecahnya komunitas, longgarnya ikatan sosial dan harus beradaptasi dengan lingkungannya yang baru (Suwartapradja, 1982). Dinamika perubahan sosial ini telah menimbulkan transformasi budaya dari generasi ke generasi dan atau antar daerah (Saefullah, 2002). Mobilitas sirkuler desa-kota dan beralihnya pekerjaan dari sektor pertanian ke sektor non-pertanian yang lebih banyak dilakukan oleh generasi muda berdampak terhadap system nilai dan budaya bagi generasi yang bersangkutan, sehingga merupakan suatu “jembatan” transformasi budaya atau masuknya budaya luar ke daerah pedesaan (Saefullah, 2002).

Munculnya traktor berawal dari kesulitan tenaga kerja disektor pertanian sebagai akibat dari semakin berkurangnya buruh tani setempat maupun yang berasal dari luar daerah. Kekurangan tenaga kerja di sektor pertanian ini tidak diikuti oleh

anak-anak mereka yang lebih memilih bekerja disektor non-pertanian atau disektor formal di kota, baik menjadi pembantu rumah tangga atau pramuwisma, menjadi tukang bangunan dan berdagang. Mencermati kondisi seperti ini kemudian beberapa diantara petani kaya membeli traktor untuk mengatasi kesulitan tenaga kerja tersebut, baik untuk menggarap lahan miliknya maupun disewakan kepada petani lainnya.

Pada petani golongan menengah dan miskin, tenaga kerja yang dipergunakannya lebih banyak tenaga manusia dibandingkan dengan menggunakan traktor. Pengolahan lahan dengan menggunakan cangkul merupakan suatu cara atau strategi didalam upaya mengurangi biaya produksi. Hal ini selain dapat menghemat biaya produksi yang cukup signifikan, dengan kedalaman mencangkul 20 – 30 cm dapat menggemburkan tanah, sehingga meningkatkan produksi yang mencapai 7-8 ton tiap ha. Pengolahan dengan menggunakan traktor yang sebetulnya lebih efektif dan efisien, dianggap kurang ekonomis, kedalamannya hanya mencapai sekitar 10 – 15 cm, sehingga tanah bagian dalam tetap mengeras dan produksinyapun lebih rendah yaitu berkisar 6 ton tiap ha.

2. Tenaga Kerja Keluarga.

Tenaga kerja keluarga terdiri dari ayah, ibu dan anak yang sudah dewasa tetapi belum kawin yang disebut tenaga kerja keluarga inti. Tenaga kerja keluarga inti ini merupakan satu kesatuan sumber daya (White, 1981, Marzali 2003 : 79) yang hanya terjadi pada petani gurem dengan pembagian tugas dan kewajibannya berdasarkan status dan peranannya di dalam keluarga tersebut Ayah dan ibu pada bidang pekerjaan tertentu, selalu mengalah dari anaknya, yaitu mengerjakan bidang pekerjaan yang mempunyai tingkat kesulitan yang lebih tinggi.

Berdasarkan sex, dapat dibedakan menurut jenis pekerjaan. Begitupula berdasarkan usia dan statusnya dapat dibedakan pekerjaan orang dewasa dan pekerjaan untuk anak-anak. Berdasarkan derajat kesukarannya dapat dibedakan pekerjaan yang sukar atau berat dan pekerjaan yang ringan. Pekerjaan yang sukar dan berat dikerjakan oleh orang tua dan pekerjaan yang mudah dan ringan dikerjakan oleh

anak-anak. Pekerjaan kaum laki-laki pada jenis pekerjaan yang lebih banyak memerlukan kekuatan fisik, seperti mencangkul dan memikul, sedangkan pekerjaan perempuan lebih banyak bidang pekerjaan yang relatif tidak memerlukan kekuatan fisik, seperti menanam dan menyiangi.

Bidang pekerjaan yang dilakukan baik di lahan basah maupun di lahan kering menunjukkan pola yang relatif sama, tetapi karakteristiknya berbeda (Iskandar, 1992, 2001). Pekerjaan dilahan basah relatif lebih mudah dibandingkan dengan lahan kering yang mempunyai tingkat kesulitan lebih tinggi. Bidang pekerjaan yang dilakukan tenaga kerja keluarga disesuaikan dengan kapasitas dan jenisnya, baik di lahan basah maupun di lahan kering, seperti disajikan pada tabel berikut.

Tabel : 2. Aktivitas dan Curahan Tenaga Kerja Keluarga dalam Pertanian

No.	Jenis Kegiatan	Pelaku				Waktu Kegiatan (Pk)
		Ayah	Ibu	Anak Laki deswasa	Anak Perempuan dewasa*	
I.	Sawah					
1.	Babad	V	-	V	-	08 – 12.00
2.	Perbaikan Pematang (<i>Mopokan</i>)	V	-	V	-	07 – 16.00
3.	Cangkul I (<i>Ngabaladah</i>)	V	-	V	-	07 – 16.00
4.	Cangkul II (<i>Nyongkog</i>)	V	-	V	-	07 – 16.00
5.	Meratakan (<i>Ngicakan</i>)	V	-	V	-	07 – 16.00
6.	Menghaluskan (<i>Nyorongan</i>)	V	-	-	-	07 – 12.00
7.	Menggarit (<i>Nehel</i>)	V	-	-	-	07 – 12.00
8.	Nebar benih (<i>Nempah</i>)	V	-	V	-	07 – 12.00
9.	Menanam (<i>Tandur</i>)	-	V	-	V	07 – 12.00
10.	Pemupukan I (<i>Ngaberak</i>)	V	V	V	-	07 – 12.00
11.	Penyiangan I (<i>Gasrok</i>)	V	V	V	V	07 – 16.00
12.	Babad pematang	V	-	V	-	08 - 12.00
13.	Penyiangan II (<i>Gasrok motong</i>)	V	V	V	V	07 – 16.00
14.	Pemupukan II (<i>Ngaberak</i>)	V	V	V	-	07 – 12.00
15.	Pembasmian hama	V	-	-	-	13.00-17.00
No.	Jenis Kegiatan	Pelaku				Waktu Kegiatan

		Ayah	Ibu	Anak Laki	Anak Perempuan*	(PK)
16.	Penyiangan III (<i>Ngarambet</i>)	-	V	-	V	07 – 12.00
17.	Panen (<i>Ngarit/Ngagebug</i>)	V	V	V	V	07 – 12.00
II.	Tegalan/Ladang					
1.	Babad (Jerami, rumput, Semak)	V	-	V	-	07.00-16.00
3.	Membakar (<i>Ngahuru</i>)	-	-	V	-	10.00- 16.00
4.	Garpu	V	-	V	-	07.00-16.00
5.	Cangkul 1	V	-	V	-	07.00-16.00
6.	Mengumpulkan(<i>Ngarag</i>)	V	-	V	-	07.00-16.00
7.	Cangkul 2	V	-	V	-	07.00-16.00
8.	Petak	V	-	V	-	07.00-16.00
9.	Garit (<i>Kamalir</i>)	V	-	V	-	07.00-16.00
10.	Nugal (<i>Ngaseuk</i>)	V	-	V	-	07.00-16.00
11.	Menanam (<i>Muuhan</i>)	-	V	-	V	07.00-12.00
12.	Menutup (<i>Nurub</i>)	-	V	-	V	07.00-12.00
13.	Penyiangan 1 (<i>Ngored</i>)	V	V	V	V	07.00-16.00
14.	Pemupukan (<i>Ngaberak</i>)	V	V	-	-	07.00-16.00
15.	Penyiangan 2 (<i>Ngored</i>)	V	V	V	V	07.00-16.00
16.	Penyiangan 3 (<i>Ngarambet</i>)	-	V	-	V	07.00-16.00
17.	Pemupukan 2 (<i>Ngaberak</i>)	V	-	-	-	07.00-16.00
18.	Pembasmian hama (<i>Marab</i>)	V	-	-	-	07.00-16.00
19.	Panen (<i>Dibuat</i>)	V	V	V	V	05.00-12.00

Keterangan : V = terlibat dalam pekerjaan

- = tidak terlibat dalam pekerjaan

* = bila diperlukan

4.2. Tenaga kerja Kolektif (*Liliuran*)

Tenaga kerja pertemanan pada masyarakat agraris ialah mengerjakan suatu pekerjaan secara bersama-sama dengan cara bergiliran tanpa kompensasi, akan tetapi dibalas dengan jasa disebut *liliuran*, *gropyokan*, atau *rempugan (Sunda)*, *sambatan (Jawa)*, *pola gondong (Maluku)*, *mapalus (Menado)*. Sistem ini mulai mengemuka

ketika kekurangan tenaga kerja keluarga pada golongan miskin atau petani gurem, seperti memperbaiki pematang, mencangkul, menanam dan penyiangan sesuai dengan kualifikasinya karena perubahan marital status anak-anak mereka. Sistem ini selain dapat mengatasi kekurangan tenaga kerja keluarga juga mengandung pengertian solidaritas diantara sesama petani gurem dan secara ekonomis dapat mengurangi biaya produksi. Bidang pekerjaan yang biasa dilakukan dalam bentuk kerjasama ini adalah pengolahan lahan, penanaman dan penyiangan.

1. Pengolahan lahan

Pengolahan lahan dengan cara pertemanan dilakukan diantara petani gurem yang memiliki lahan sawah maupun lahan kering rata-rata kurang dari 0,1 ha. Mereka ini adalah golongan menengah ke bawah sebagai petani pemilik. Pengolahan dilakukan berdasarkan domisili atau berdasarkan hamparan, akan tetapi lebih banyak dilakukan berdasarkan domisili. Berdasarkan domisili lebih banyak dilakukan oleh bukan kerabat yang kepemilikan lahannya berdasarkan gono-gini karena relatif lebih efektif dan efisien di dalam mengkoordinasikan suatu permasalahan. Berdasarkan hamparan atau berdekatan terkait dengan historis kepemilikannya, sehingga pesertanya masih mempunyai ikatan kerabat dan koordinasi dilakukan di tempat bekerja.

Jumlah anggota pertemanan dalam pengolahan lahan baik pada lahan basah maupun pada lahan kering disesuaikan dengan kemampuan seseorang untuk menggarap lahan tersebut. Sebagai contoh, lahan sawah 0,1 ha dapat dikerjakan oleh seorang pemiliknya selama 10 hari, sama dengan dikerjakan oleh 5 orang selama dua hari. Oleh karena itu jumlah peserta pertemanan untuk lahan basah berkisar antara 3-5 orang. Artinya, dengan anggota 5 orang bagi yang mendapatkan giliran terakhir mendapatkan giliran pada hari ke 10 yang diperhitungkan tidak akan tertinggal dari jadwal tanam yang dilakukan secara serentak oleh setiap petani. Jika keanggotaannya lebih dari 5 orang bagi anggota yang mendapatkan giliran terakhir akan tertinggal, tidak hanya dalam penanaman akan tetapi juga dalam pemanenan. Ketertinggalan

penanaman atau penanaman yang tidak seragam atau tidak bersamaan dapat memicu muncul dan berkembangnya hama penyakit.

Berbeda dengan pengolahan lahan basah. Pengolahan pada lahan kering yang musim tanamnya menunggu air hujan mempunyai tingkat kesulitan 2 kali lipat. Pengolahan lahan dikerjakan berkisar antara 1 – 2 bulan menjelang musim penghujan (*sacur hujan*), sehingga relatif lebih longgar, karena musim tanam dilakukan di musim penghujan. Jumlah keanggotaannya relatif lebih banyak yaitu berkisar antara 5 – 10 orang dan bagi anggota yang mendapatkan giliran terakhir akan menamatkan giliran pada hari ke 20. Jumlah anggota pertemanan pada kedua kategori sistem pengolahan lahan tersebut merupakan suatu pertimbangan yang rasional, yang terkait dengan jadwal tanam. Jumlah anggota dilahan kering sebetulnya dapat dilakukan lebih banyak lagi karena mempunyai waktu yang relatif lebih lama. Namun, karena pertimbangan teknis, yaitu waktu pergiliran yang terlalu lama dapat mengganggu aktivitas lainnya, sehingga jumlah keanggotaannya relatif terbatas, seperti yang mereka lakukan sebelumnya.

Pengerahan tenaga kerja pertemanan seperti di atas dapat dikatakan sebagai sanggahan terhadap hipotesis Geertz (1976) yang mengasumsikan bahwa pada masyarakat petani di pedesaan Jawa akan sangat kekurangan tenaga kerja karena ketergantungan terhadap buruh tani. Hipotesis Geertz sebenarnya cukup beralasan dan pada saat ini tenaga kerja buruh tani tergantikan oleh traktor. Namun, Geertz, nampaknya kurang memperhatikan sistem pertemanan sebagai tenaga kerja, karena berdasarkan strata sosialnya terdapat golongan miskin atau petani gurem. Petani kaya dalam pengolahan lahannya lebih banyak mempergunakan traktor dan petani golongan menengah lebih banyak mempergunakan tenaga kerja buruh tani, sedangkan petani gurem lebih banyak mempergunakan tenaga kerja keluarga dan pertemanan.

2. Penanaman

Penanaman atau tander dilakukan oleh perempuan baik oleh pemilik, penggarap maupun buruh tani. Golongan kaya dan menengah sebagai petani pemilik penggarap menggunakan buruh tani terutama yang berasal dari daerah setempat. Minat buruh tani perempuan untuk bekerja dibidang penanaman ini cukup tinggi, tetapi pemilik lahan baik golongan kaya maupun menengah lebih mengutamakan yang berlangganan. Buruh tani yang terlibat dalam penanaman ini mempunyai kesempatan untuk memanen atau *derep* yang menjadi harapan setiap buruh tani. Pada saat pemanenan, pemilik atau majikan tidak mengundang buruh tani yang tidak terlibat dalam penanaman, akan tetapi langsung mengundang buruh tani yang terlibat bahwa pemanenan akan dilaksanakan pada hari tertentu. Golongan miskin sebagai petani pemilik penggarap menggunakan tenaga kerja keluarga dan liliuran.

Bentuk kerjasama atau *liliuran* dalam penanaman seperti halnya yang dilakukan pada pengolahan lahan berdasarkan domisili yaitu golongan miskin atau petani gurem dengan jumlah peserta yang sama dengan anggota *liliuran* pada pengolahan lahan. Penanaman dikerjakan oleh istri-istri mereka yang terlibat dalam pengolahan lahan yaitu sebanyak 3-5 orang. Kemampuan tenaga kerja perempuan untuk menanam padi sekitar 200 m tiap orang tiap hari, sehingga untuk ukuran 0,1 ha yang dikerjakan oleh 5 orang dapat diselesaikan dalam satu hari.

3. Penyiangan (*ngarambet*)

Penyiangan atau *ngarambet* bisa dilakukan oleh tenaga perempuan maupun laki-laki sesuai dengan jenis pekerjaannya, seperti penyiangan pertama dan kedua dengan cara digarok dapat dilakukan oleh laki-laki, tetapi majikan lebih banyak mempergunakan buruh tani perempuan karena upahnya lebih murah dari tenaga kerja laki-laki. Mereka ini adalah yang terlibat dalam penanaman dan mempunyai kesempatan untuk memanen atau *derep*. Penyiangan diselesaikan dalam 1 hari, baik pada penyiangan pertama, kedua maupun ketiga. Golongan kaya dan golongan menengah mempergunakan buruh tani perempuan menyerap tenaga kerja sekitar 30

HOK tiap ha tiap musim tanam. Pada golongan petani gurem penyiangan dikerjakan dengan cara *liliuran*. Anggota peserta dalam kegiatan ini adalah istri-istri mereka yang terlibat dalam pengolahan lahan, sehingga jumlah anggota *liliuran* dalam penyiangan relatif sama dengan pengolahan lahan yaitu berkisar antara 3-5 orang.

4. Pemanenan

Pemanenan dilakukan oleh tenaga kerja yang terlibat dalam penanaman dan atau penyiangan. Keterlibatan penanam dan atau tenaga kerja penyiangan dalam pemanenan, seperti halnya terjadi sebelum tahun 1970-an, ketika petani belum menanam benih unggul atau masih menanam padi lokal. Pada saat itu pemanenan dikerjakan oleh tenaga kerja yang terlibat dalam penanaman dan penyiangan. Keterlibatan tenaga kerja yang telah membantu penanaman dan penyiangan dalam pemanenan terkait dengan sistem nilai dan budaya mereka yaitu akan mendapat malu apabila tidak melibatkan tenaga kerja yang telah membantunya dan enggan untuk meminta bantuan kembali. Begitu seterusnya, setiap tenaga kerja yang terlibat dalam penanaman dan penyiangan diikutsertakan dalam pemanenan. Azas resiprositas atau balas jasa dan golongan kaya membantu yang miskin sudah lumrah atau umum terjadi pada masyarakat petani.

Panen, tidak hanya menjadi dambaan bagi petani pemilik, akan tetapi juga bagi buruh tani. Bagi pekerja atau buruh tani panen memberikan kontribusi terhadap ekonomi keluarga dalam menyambung hidupnya. Bagi pemilik terkandung sistem nilai untuk saling mencicipi dan atau membantu bagi mereka yang pærsediaan berasnya sudah menipis, sehingga dapat mengeratkan hubungan diantara mereka.

Pemanenan dilakukan dengan cara disabit dan kemudian dirontokan pada suatu alat yang terbuat dari kayu dan bambu yang disebut *ngagebug*. Pada panen ini setiap pemanen tidak memperoleh upah harian dalam bentuk uang, akan tetapi berupa gabah dengan pembagian 10 : 1. Artinya setiap 10 kg gabah hasil panen, pemanen memperoleh bagian 1 kg sebagai imbalan atau upah kerja yang disebut *catu*. Pembagian hasil dalam pemanenan tidak ada perbedaan untuk laki-laki dan

perempuan dan bahkan bagi pemanen yang terdiri dari suami, istri dan anaknya menjadi satu kesatuan.

4.3. Implikasi Terhadap Pendapatan

Tenaga kerja disektor pertanian lebih banyak dilakukan secara individual daripada kolektif. Tenaga kerja individual dengan mempegunakan buruh tani setempat dan buruh tani dari luar daerah baik laki-laki maupun perempuan. Buruh tani setempat terutama tenaga kerja *matuh* atau *bujang* curahan hari kerjanya lebih banyak dan mendapat kesempatan untuk *derep* atau mendapatkan *catu*, sedangkan buruh tani dari luar daerah tidak demikian, sehingga perbandingan pendapatan buruh tani setempat dengan buruh tani dari luar daerah berkisar 2 : 1.

Upah kerja buruh tani, baik yang *matuh* ataupun tidak *matuh*, baik dari daerah setempat maupun dari luar daerah tidak ada perbedaan. Upah kerja buruh tani laki-laki Rp. 20.000,- tiap orang tiap hari dan upah kerja perempuan Rp. 12.500,- tiap orang tiap hari dan makan 3 kali tiap hari. Buruh tani laki-laki yang terserap dalam pengolahan lahan basah sebanyak 64 hari orang kerja laki-laki (HOKL) atau meningkat 20 HOKL (68,75 %) dari tahun 1980-an yang menyerap 44 HOKL. Tenaga kerja laki-laki yang terserap dalam kegiatan lainnya sebanyak 42 HOKL atau tenaga kerja laki-laki yang terserap dalam pengolahan lahan dan kegiatan lainnya pada saat sekarang sebanyak 106 HOKL tiap ha tiap musim (Tabel 3), sedangkan pada tahun 1980-an sebanyak 86 HOKL tiap ha tiap musim (BPS, 1980). Perbedaan HOKL ini terkait dengan beralihnya penggunaan pupuk organik ke an-organik yang berdampak terhadap kegemburan dan kesuburan lahan. Petani pada saat sekarang lebih banyak mempegunakan pupuk an-organik yang mengikat partikel-partikel tanah, sehingga tanah menjadi padat dan mengeras yang pada pigilirannya meningkatkan tingkat kesulitan pengolahannya.

Tenaga kerja laki-laki yang terserap dalam pengolahan lahan sebanyak 64 HOKL atau upah pengolahan lahan yang harus dikeluarkan sebesar Rp. 1.280.000,- tiap ha tiap musim atau tenaga kerja laki-laki yang terserap selama aktivitas pertanian

sebanyak 106 HOKL atau sebesar Rp. 2.120.000,- tiap ha tiap musim. Upah pengolahan lahan dengan mempergunakan traktor lebih kecil dari upah buruh tani yaitu sebesar Rp. 1.050.000,- tiap ha tiap musim atau terdapat selisih Rp. 230.000,- tiap ha tiap musim. Penggunaan traktor lebih banyak dilakukan oleh golongan kaya, karena topografi lahan yang memungkinkan dan relatif sulitnya tenaga kerja buruh tani. Petani golongan menengah lebih memilih dengan cara dicangkul atau lebih banyak mempergunakan buruh tani dengan pertimbangan topografi lahan yang kurang memungkinkan dan tingkat produktivitasnya relatif baik yaitu mencapai 7 ton gabah tiap ha tiap musim, dibandingkan dengan mempergunakan traktor yang hanya mencapai 6 ton gabah tiap ha tiap musim. Petani golongan miskin atau petani gurem mempergunakan tenaga kerja keluarga dan pertemanan dengan pertimbangan mengurangi biaya produksi.

Tenaga kerja perempuan diperlukan dalam penanaman dan penyiangan. Pekerjaan penanaman menyerap tenaga kerja sebanyak 19 hari orang kerja perempuan (HOKP) dan untuk penyiangan 42 HOKP tiap ha tiap musim. Upah tenaga kerja perempuan baik pada penanaman maupun penyiangan sama yaitu Rp. 12.500,- tiap orang tiap hari. Ini berarti bahwa upah tenaga kerja dalam penanaman yang harus dikeluarkan sebesar Rp. 237.500,- tiap ha tiap musim dan upah tenaga kerja penyiangan Rp. 525.000,- tiap ha tiap musim.

Pemanenan memerlukan tenaga kerja baik laki-laki maupun perempuan. Buruh tani yang memperoleh kesempatan untuk memanen (*derep*) atau mendapatkan *catu* adalah buruh tani yang *matuh* atau berlangganan baik dari daerah setempat maupun dari luar daerah, sedangkan yang tidak berlangganan tidak memperoleh kesempatan untuk *derep*, hanya sebagai tenaga kerja harian biasa. *Catu* merupakan bagian dari hasil panen atau *derep*, sebagai upah harian selama *derep* berlangsung. Tenaga kerja dibidang ini bisa individual ataupun kolektif, tetapi lebih banyak dilakukan secara kolektif oleh tenaga kerja keluarga inti (ayah, ibu dan seorang anak). Pada setiap pemanenan, keluarga inti memperoleh hasil berkisar antara 60 kg – 120 kg tiap hari tiap panen atau rata-rata 70 kg gabah basah tiap ha tiap panen. Apabila

dikonversikan dengan harga gabah Rp. 2.000,- tiap kg, maka penghasilan derep setara dengan Rp.140.000,- tiap 3 orang tiap hari atau memperoleh upah Rp. 45.000,- tiap orang tiap hari. Perolehan *catu* hasil *derep* ini lebih besar yaitu 3 kali lipat dari upah kerja harian dan penderep mendapatkan kesempatan memanen sekitar 10 hari, sehingga mendapatkan hasil sekitar Rp. 1.400.000,- tiap 3 orang tiap musim. Bagi buruh tani, masa panen ini merupakan sumber rejeki yang utama dan merupakan kesempatan untuk mengeruk rejeki, sehingga setiap buruh tani selalu berharap untuk mendapatkan kesempatan *derep* ini dan mereka enggan mengikuti program transmigrasi (Alkhmad, dkk, 1985; Suwartapradja, 2004). Upah kerja dalam pemanenan dengan hasil 6.000 kg gabah tiap ha, berarti mengeluarkan biaya sebanyak 600 kg gabah setara dengan Rp. 1.200.000,-tiap ha tiap musim.

Pengangkutan disesuaikan dengan jarak, yaitu lokasi yang relatif dekat dengan cara dipikul dan yang relatif jauh mempergunakan kendaraan roda 4. Biaya pengangkutan baik yang dikerjakan oleh tenaga manusia ataupun mempergunakan kendaraan bermotor roda 4 relatif sama yaitu sekitar Rp. 700.000,-. Padi yang diangkut kemudian dijemur untuk mencapai kadar air 70 % atau gabah kering giling (GKG) berkisar 3 – 7 hari sesuai dengan musim atau rata-rata 3 hari, sehingga menyerap tenaga kerja sekitar 16 HOKL atau setara dengan Rp.320.000,- tiap ha tiap musim. Upah tenaga kerja yang harus dikeluarkan selama aktivitas pertanian dengan mempergunakan tenaga kerja buruh tani baik untuk pengolahan lahan, penanaman, penyiangan, pemanenan dan biaya pengangkutan dengan mempergunakan tenaga kerja buruh tani saja sebesar Rp. 3.782.500,- tiap ha tiap musim, sedangkan dengan mempergunakan traktor dan tenaga kerja buruh tani sebesar Rp. 3.552.500,-.

Produksi padi lahan basah dengan cara dicangkul sebanyak 7 ton gabah basah atau 4,9 ton gabah kering giling (GKG) dan pengolahan lahan dengan mempergunakan traktor menghasilkan 6 ton gabah basah atau 4,2 ton GKG tiap ha tiap musim. Ini berarti bahwa penghasilan petani lahan basah dengan cara dicangkul memperoleh penghasilan Rp. 9.800.000,- lebih besar daripada mempergunakan traktor yaitu Rp. 7.200.000,- tiap ha tiap musim. Penghasilan bersih yang diperoleh

petani setelah dikurangi biaya produksi yaitu Rp. 9.800.000,- - Rp. 5.432.500,- sebesar Rp. 4.367.500,- tiap keluarga tiap musim (selama 105 hari) atau rata-rata sekitar Rp. 4.159,55,- tiap keluarga tiap hari.

Berbeda dengan tenaga kerja individual. Tenaga kerja kolektif dilakukan oleh keluarga inti dan dengan cara pertemanan atau *liliuran*. Penggunaan tenaga kerja pada keluarga inti terjadi pada golongan miskin. Bagi petani gurem anak merupakan tenaga kerja yang dapat membantu pekerjaan orang tua, sehingga tenaga kerja anak dalam keluarga inti merupakan suatu modal ekonomi di dalam mengerjakan kegiatan-kegiatan disektor pertanian. Ini berarti bagi petani gurem yang memiliki lahan 0,1 ha dengan mempergunakan tenaga kerja keluarga dapat menghemat sekitar Rp. 394.250,-. Tiap 0,1 ha tiap musim. Begitu pula dengan cara *liliuran* yang juga terjadi pada petani gurem, setiap anggota tidak mendapatkan upah akan tetapi dengan balas jasa. Azas resiprositas yang berlaku tersebut apabila dikonversikan dapat menghemat biaya produksi sebesar Rp. 394.250,- tiap 0,1 ha tiap musim, atau setara dengan penghematan rata-rata Rp. 3.755,- tiap hari selama satu musim.

Tabel : 3. Analisis usaha tani padi di lahan basah (1 ha/musim)

No	Kegiatan	Tenaga kerja	Satuan	Satuan Upah	Jumlah	%
I.	Biaya Produksi					
1.	Pengolahan lahan					
	1. Perbaikan pematang (<i>Mopokan, Nyisian</i>)	Manusia	7 HOKL	20.000,-	140.000,-	2,6
	2. Pengolahan lahan*	Manusia	64 HOKL	20.000,-	1.280.000,-	23,6
	3. Meratakan (<i>Nyorongan</i>)	Manusia	3 HOKL	20.000,-	60.000,-	1,1
	4. Mengarit (<i>Nehel</i>)	Manusia	3 HOKL	20.000,-	60.000,-	1,1
2.	Persemaian					
	1. Penyiapan lahan	Manusia	3 HOKL	20.000,-	60.000,-	1,1
	2. Benih		40 kg	20.000,-	800.000,-	14,7
	2. Penyemaian (1/2 hari)	Manusia	1 HOKL	20.000,-	20.000,-	0,4
3.	Penanaman					
	1. Pencabutan benih/ babut	Manusia	7 HOKP	12.500,-	87.500,-	1,6
	2. Pengangkutan	Manusia	4 HOKL	20.000,-	80.000,-	1,5
	3. Tanam/Tandur	Manusia	12 HOKP	12.500,-	150.000,-	2,7
4.	Pemupukan					
	1. Pemupukan 1 (1/2 hari)	Manusia	1,5 HOKL	20.000,-	30.000,-	0,6
	2. Pemupukan 2 (1/2 hari)	Manusia	1,5 HOKL	20.000,-	30.000,-	0,6
5.	Penyiangan					
	1. Garok 1	Manusia	14 HOKP	12.500,-	175.000,-	3,2
	2. Garok 2/ malikan	Manusia	14 HOKP	12.500,-	175.000,-	3,2
	3. Ngarambet	Manusia	14 HOKP	12.500,-	175.000,-	3,2
6.	Pembasmian hama					
	1. Penyemprotan 1(1/2 hari)	Manusia	1,5 HOKL	20.000,-	30.000,-	0,6
	2. Penyemprotan 2(1/2 hari)	Manusia	1,5 HOKL	20.000,-	30.000,-	0,6
7.	Pembersihan pematang					
	1. Babad pematang	Manusia	3 HOKL	20.000,-	60.000,-	1,1
7.	Pengawasan					
	1. Pemantauan air (1/2 hari)	Manusia	6 HOKL	20.000,-	120.000,-	2,2
7.	Saprodi					
	1. Pupuk Urea		300 kg	1.100,-	330.000,-	6,1
	2. Pupuk TS		100 kg	1.500,-	150.000,-	2,7
	3. Pupuk KCL		150 kg	1.800,-	270.000,-	4,9
	4. Festisida		5 botol	20.000,-	100.000,-	1,8
8.	Pemanenan					
	1. Pengangkutan	Roda 4	7000 kg	Paket	700.000,-	12,9
	2. Penjemuran dan penyimpanan	Manusia	16 HOKL	20.000,-	320.000,-	5,9
	Jumlah				5.432.500,-	100
II	Produksi (GKG)		4.9000 kg	2000/kg	9.800.000,-	
III	Hasil bersih				4.367.500,-	

Sumber : Data Primer, 2007

Keterangan :

* = Pengolahan lahan mempergunakan traktor Rp. 150.000,- tiap tumbak (14 m²) atau = Rp. 1.050.000,- tiap ha

HOKL = hari orang kerja laki-laki

HOKP = hari orang kerja perempuan

V. SIMPULAN DAN SARAN

5.1. Simpulan

Dari uraian di atas dapat disimpulkan bahwa Geertz yang mengasumsikan bahwa disektor pertanian akan kesulitan tenaga kerja memang benar, akan tetapi ia tidak memperhitungkan teknologi dan tenaga kerja pertemanan, sehingga kekurangan tenaga kerja disektor pertanian yang dikhawatirkan Geertz, dapat diatasi dengan sistem pertemanan atau *liliuran*.

Bentuk kerjasama *Liliuran/gropyokan/rembugan* dapat menjaga dan atau mengeratkan hubungan diantara pelakunya. Interaksi yang terjalin pada setiap kegiatan dapat menumbuhkembangkan rasa solidaritas, kebersamaan, senasib dan sepenanggungan, sehingga hubungan diantara mereka akan tetap terpelihara. Fenomena tersebut masih kental dalam kehidupan masyarakat agraris terutama bagi mereka yang masih dicirikan oleh sifat-sifat tradisional (*Post Traditional*). Dari segi ekonomi sistem kerjasama tersebut dapat menguntungkan diantara anggota yang terlibat mempunyai hak dan kewajiban yang sama. Pelaku atau anggota tidak mengeluarkan biaya, akan tetapi dengan balas jasa, sehingga dapat mengurangi biaya produksi yang pada gilirannya meningkatkan pendapatannya.

Keberadaan tenaga kerja buruh tani menunjukkan penurunan seiring dengan berkembangnya mekanisasi pertanian dan kemajuan teknologi. Berkurangnya kesempatan bekerja disektor pertanian disatu pihak buruh tani beralih ke sektor non pertanian dan generasi berikutnya tidak lagi mengikuti pekerjaan orang tuanya, akan tetapi beralih kesektor perdagangan dan jasa, sehingga disektor pertanian terjadi kekurangan tenaga kerja manusia. Dilain pihak sistem pewarisan terus berlangsung dan luas pemilikan lahan semakin sempit. Budaya ini berdampak terhadap penyerapan tenaga kerja disektor pertanian, yaitu mengoptimalkan tenaga kerja keluarga dan melalui suatu bentuk kerjasama atau *Liliuran*.

5.2. Saran

Pada masyarakat agraris telah terjadi perubahan paradigma terutama yang terkait dengan tenaga kerja keluarga. Kesulitan tenaga kerja telah meningkatkan upah kerja buruh tani dan traktor, sehingga meningkatkan biaya produksi. Peningkatan produksi belum tentu meningkatkan pendapatan petani, sedangkan mengurangi biaya produksi mengandung pengertian meningkatkan pendapatan petani. Pengurangan biaya produksi dapat dilakukan dengan menggunakan tenaga kerja keluarga dan pertemanan. Bentuk kerjasama atau *liluran* perlu mendapat dukungan politis (political will) dari pemerintah, seiring dengan semakin sempitnya luas pemilikan lahan.

Daftar Pustaka

- Akhmad Hisyam dan Suwartapradja, Opan S, 1984, Aspek Sosial Budaya Pemukiman Penduduk yang Terkera Proyek PLTA Saguling, *Makalah*, Seminar Bandung, Kerjasama PPSDAL LP UNPAD dengan PLN Pikitdro Jawa Barat, Bandung, PPSDAL-LP-UNPAD
- Collier, William, 1977, “*Masalah Pangan, Pengangguran dan Gerakan Penghijauan di Pedesaan Jawa*”, Prisma, No., 7
- Geertz, C, 1976, *Involusi Pertanian : Proses Perubahan Ekologi di Indonesia*, Jakarta, Bhratara Karya Aksara
- Hayami, Y. dan M. Kikuchi, 1981, *Asian Village Economy at the Crossroads: An Economic Approach to Institutional Change*, Tokyo
- Iskandar, Johan, 1992, *Ekologi Perladagangan di Indonesia*, Djambatan
- Iskandar, Johan, 2001, *Manusia, Budaya dan Lingkungan*, Bandung, Humaniora
- Koentjaraningrat, 1981, *Mentalitet dan kebudayaan*, Jakarta, Aksara Baru
- Koentjaraningrat, 1977b, ”Sistem Gotong Royong dan Jiwa Gotong Royong.” *Berita Antropologi*, 30:4-6, Jakarta : Fakultas Sastra Universitas Indonesia
- Mantra, 1985, *Migrasi Desa-Kota*, Yogyakarta, PPK, UGM
- Marzali, Amri, 2003, *Strategi Peisan Cikalong dalam Menghadapi Kemiskinan*, Jakarta, Yayasan Obor Indonesia
- Mubyarto, 1985, Pny, *Peluang Kerja dan Berusaha di Pedesaan*, Yogyakarta, BPFE, UGM
- Nazir, Moch, 2003, *Metode Penelitian*, Jakarta, Indonesia, Ghalia
- Penny, D.H, 1982, Komersialisasi Pertanian Subsisten : Satu Kemajuan atau Kemunduran, dalam Sajogjo, Peny, *Bunga Rampai Perekonomian Desa*, Yayasan Agro Ekonomika
- Saefullah, A.D., 2002, Migrasi Sebagai Jembatan Desa Kota, *Orasi Ilmiah*, Pengukuhan Guru Besar, Bandung, Universitas Padjadjaran.
- Mubyarto, Pny, 1985, *Peluang Kerja dan Berusaha di Pedesaan*, Yogyakarta, BPFE
- Soemarwoto, Otto, 1983, *Ekologi, Pembangunan dan Lingkungan Hidup*, Jakarta, Djambatan
- Soekanto, Suryono, 1982, *Pengantar Sosiologi*, Jakarta, Aksara Baru
- Suwartapradja, Opan S, 1982, Keterikatan dan dorongan Penduduk Untuk Pindah, *Makalah : Kursus Analisis Dampak Lingkungan*, kerjasama PPSDAL-LP-UNPAD dengan Kantor Mentri Kependudukan dan Lingkungan Hidup, Bandung, PPSDAL-LP-UNPAD
- Suwartapradja, 2004, Transmigrasi Lokal dan Masalah yang dihadapi, *Jurnal Kependudukan*, Vol. ...
- White, Benjamin, 1981, Population, Involution, and Employment in Rural Java, dalam *Agricultural and Rural Development in Indonesia*, Disunting oleh Grealrd E. Hanszen. Boulders : Westview Press